

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Any Suryani Hamzah dan Mohammad Irfan. 2017. *Hukum Dan Pariwisata*. Pustaka Bangsa. Mataram.
- Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda*. Total Media. Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2002. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Haw. Widjaya. 2004. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Raja Grafindo. Jakarta.
- H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Penerbit Nusa. Bandung.
- H. Rozali Abdullah. 2010. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- H. Syaukani, Afan Gafar, dan M. Ryaas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hesti Puspitasari, Khalikussabir & Luthfi J. Kurniawan. 2012. *Filosofi Pelayanan Publik*, Setara Press. Malang.
- Nyoman S.Pendit. 2006. *Ilmu Pariwisata*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sadjijono. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Laks Bang Press In. Yogyakarta.
- Saswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance: Sistem Pemerintahan Yang Baik*. Mandar Maju. Bandung.
- Sri Soemantri. 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. PT Alumni. Bandung.
- Sulastio, dkk. 2008. *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*. In-TRANS. Malang. Hlm.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Prestasi Pustakarya. Jakarta.

Violetta Simatupang. 2009. *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*. PT ALUMNI. Bandung.

Wahab. 2003. *Manajemen Kepariwisata*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Yoeti. 2001. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Penerbit Angkasa. Bandung.

Yoeti. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Pradya Pratama. Jakarta.

Skripsi

A.Fadhilah. 2011. *Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menjamin Kebebasan Beragama Bagi Warga Indonesia*". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universtias Hasanuddin, Makassar.

Ilham Akbar Ilyas. 2012. *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kota Makassar*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Website

Erwin Hutapea. 2019. Dalam Wikipedia tertanggal 26 Januari 2019. [https:// id.wikipedia.org./wiki/Otonomi_Daerah/](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_Daerah/).

Peraturan Perundang-Undangan

Lampiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada bangunan Gedung dan Lingkungan.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku, Audio, Dan Sarana Lainnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.